

Implementasi Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) Sebagai Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Kota Makassar

Muhammad Alfatiha Sesa¹

¹ Universitas Hasanuddin; alfses174@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta diperkuat dengan perspektif ekonomi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GEMASKOP dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan koperasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap koperasi. Komunikasi program berjalan cukup baik melalui pertemuan langsung dan media sosial, meskipun jangkauan informasi belum merata. Dari aspek sumber daya, keterbatasan personel dan belum adanya tim khusus menjadi tantangan utama. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang positif terhadap tujuan program, sedangkan struktur birokrasi telah mendukung implementasi melalui mekanisme kelembagaan yang ada. Namun, partisipasi masyarakat dan budaya berkoperasi masih perlu diperkuat. Dari perspektif ekonomi politik, GEMASKOP merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat melalui penguatan koperasi. Keberhasilan program bergantung pada kapasitas kelembagaan, kesinambungan pembinaan, dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Kata kunci: implementasi kebijakan, GEMASKOP, koperasi, ekonomi kerakyatan, ekonomi politik.

Keywords: Implementasi Kebijakan, GEMASKOP, Koperasi, Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Politik

1. Introduction

Pembangunan ekonomi Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam kerangka tersebut, koperasi ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Namun demikian, perkembangan koperasi masih menghadapi berbagai tantangan berupa rendahnya partisipasi anggota, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta persepsi masyarakat yang masih menganggap koperasi sebagai organisasi formal semata. Kota Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia juga menghadapi persoalan serupa. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM kemudian menginisiasi Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap koperasi dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Program ini menjadi penting karena tidak hanya berorientasi pada pembinaan administratif, tetapi juga pada pembangunan kesadaran sosial dan ekonomi masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi GEMASKOP serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Kajian ini juga berupaya melihat program tersebut dari perspektif ekonomi politik sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam penguatan ekonomi rakyat.

Dalam perspektif ekonomi politik, negara memiliki peran strategis dalam membentuk arah pembangunan ekonomi melalui kebijakan publik. Staniland menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari proses politik dan kelembagaan yang membentuknya. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan koperasi dapat dipahami sebagai instrumen negara untuk membangun struktur ekonomi yang lebih inklusif. GEMASKOP hadir dalam konteks tersebut sebagai upaya pemerintah daerah untuk memperkuat koperasi melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi pelaksana, komunikasi kebijakan, dan keterlibatan masyarakat. Namun kajian yang secara spesifik membahas implementasi GEMASKOP masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan publik dan ekonomi kerakyatan di tingkat daerah.

2. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kota Makassar dengan fokus pada implementasi Program GEMASKOP yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Informan penelitian terdiri atas pejabat Dinas Koperasi dan UKM, pengurus koperasi, anggota koperasi, pelaku UMKM, masyarakat, dan akademisi yang memahami isu koperasi.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk menggali pengalaman dan pandangan informan mengenai implementasi program. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung aktivitas program dan interaksi para aktor yang terlibat. Dokumentasi dilakukan terhadap dokumen kebijakan, laporan program, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika implementasi kebijakan dalam konteks sosial dan politik yang melingkupinya.

3. Result and Discussion

Kota Makassar merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dengan perkembangan sektor jasa dan perdagangan yang cukup pesat. Meskipun demikian, penguatan kelembagaan ekonomi rakyat masih menjadi tantangan. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mencatat keberadaan lebih dari seribu koperasi dengan tingkat keaktifan yang beragam. Kondisi tersebut menjadi latar belakang lahirnya GEMASKOP.

Relevansi GEMASKOP terhadap Penguatan Koperasi

Program GEMASKOP dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan. Melalui sosialisasi dan pembinaan, pemerintah berupaya membangun pemahaman bahwa koperasi bukan sekadar lembaga simpan pinjam, tetapi wadah demokrasi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai koperasi dan mendorong sebagian koperasi untuk lebih aktif dalam kegiatan kelembagaan.

GEMASKOP dalam Perspektif Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, GEMASKOP memiliki relevansi karena berupaya memperkuat kapasitas masyarakat melalui koperasi. Program tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga mendorong partisipasi dan kesadaran kolektif. Temuan menunjukkan bahwa peserta program memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip koperasi, hak dan kewajiban anggota, serta manfaat berkoperasi bagi kesejahteraan ekonomi.

Komunikasi dalam Implementasi Program

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Dinas Koperasi dan UKM menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti sosialisasi langsung, pelatihan, pendampingan, dan media sosial. Strategi ini memungkinkan penyebaran informasi yang relatif luas. Meskipun demikian, jangkauan komunikasi masih terbatas pada kelompok tertentu sehingga belum seluruh lapisan masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai program. Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih inklusif melalui kerja sama dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan organisasi masyarakat.

Sumber Daya dalam Implementasi Program

Implementasi GEMASKOP menghadapi tantangan terkait ketersediaan sumber daya. Tidak adanya tim khusus yang menangani program menyebabkan pelaksanaan masih bergantung pada bidang kelembagaan di Dinas Koperasi dan UKM. Keterbatasan jumlah personel berdampak pada kemampuan menjangkau sasaran yang lebih luas. Selain itu, keterbatasan anggaran memengaruhi frekuensi dan cakupan kegiatan. Meski demikian, pelaksana berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui kolaborasi dan pemanfaatan media digital.

Disposisi Pelaksana

Komitmen pelaksana merupakan faktor yang mendukung keberhasilan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Dinas Koperasi dan UKM memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam menjalankan program. Mereka memandang GEMASKOP sebagai instrumen penting untuk memperkuat koperasi dan meningkatkan literasi ekonomi masyarakat. Komitmen ini terlihat dari konsistensi pelaksanaan kegiatan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan dalam memastikan koordinasi dan pembagian tugas berjalan dengan baik. Implementasi GEMASKOP telah didukung oleh mekanisme kelembagaan yang relatif jelas. Namun koordinasi lintas sektor masih perlu ditingkatkan agar program dapat

menjangkau masyarakat lebih luas. Keterlibatan perangkat daerah lain dan pemangku kepentingan eksternal dapat meningkatkan efektivitas implementasi.

Analisis Ekonomi Politik

Dari perspektif ekonomi politik, GEMASKOP menunjukkan peran aktif pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan ekonomi masyarakat. Program ini merupakan bentuk intervensi negara untuk memperkuat institusi ekonomi rakyat melalui koperasi. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis birokrasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun legitimasi, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, implementasi GEMASKOP dapat dipahami sebagai proses politik dan ekonomi yang saling berkaitan.

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan ini sejalan dengan model implementasi Edwards III. Komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang jelas menjadi faktor utama keberhasilan implementasi. Namun, keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, keberlanjutan program memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses administratif. Dalam konteks koperasi, implementasi juga berkaitan dengan proses membangun kesadaran sosial dan budaya ekonomi masyarakat. Karena itu, keberhasilan GEMASKOP harus diukur tidak hanya dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari perubahan sikap dan partisipasi masyarakat terhadap koperasi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan membutuhkan strategi jangka panjang. Koperasi memerlukan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan jaringan usaha. GEMASKOP dapat menjadi fondasi awal untuk mencapai tujuan tersebut apabila didukung oleh kebijakan yang konsisten dan partisipasi masyarakat yang lebih luas.

4. Conclusion

Program GEMASKOP merupakan kebijakan strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi. Implementasi program

telah menunjukkan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai koperasi dan pentingnya partisipasi dalam kegiatan ekonomi berbasis kebersamaan.

Keberhasilan implementasi didukung oleh komunikasi yang cukup efektif, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya tim khusus, dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Dari perspektif ekonomi politik, GEMASKOP mencerminkan peran pemerintah daerah sebagai aktor yang aktif dalam mengarahkan pembangunan ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, perluasan jangkauan sosialisasi, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta pembinaan yang berkelanjutan bagi koperasi dan masyarakat.

References

- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hatta, M. (2015). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Kompas.
- Huberman, A. M., Miles, M. B., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- Staniland, M. (1985). *What Is Political Economy?* Yale University Press.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Statistik Perkoperasian Indonesia*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. (2021). *Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2021–2026*.
- Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2023.